

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis *Monitoring* oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan (*Compliance*)

DPRD Kabupaten Sidoarjo telah berhasil menjalankan fungsi *monitoring* kepatuhan secara efektif melalui pengawasan terhadap regulasi primer dan disiplin ketat terhadap *timeline* penganggaran. Lembaga legislatif memastikan pelaksanaan APBD selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019, yang dibuktikan dengan ketepatan waktu penetapan APBD 2024. Keberhasilan prosedural ini menghadapi hambatan eksternal berupa ketidakkonsistenan manajemen waktu (*timing*) eksekusi oleh pihak OPD yang tidak sesuai dengan *schedule* rencana awal, sehingga memicu keterlambatan serapan anggaran di lapangan.

2. Pemeriksaan (*Auditing*)

Variabel pemeriksaan oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo dinyatakan berhasil melalui penguatan verifikasi data dan pembuktian fisik secara intensif. Dewan secara aktif mengidentifikasi temuan krusial berupa piutang daerah sebesar Rp536 miliar serta kegagalan teknis pada proyek strategis seperti

SMPN 3 Waru dan Pasar Krian. Capaian positif dalam mengungkap fakta empiris ini masih menghadapi tantangan berupa pelaporan eksekutif yang bersifat global, sehingga fungsi pemeriksaan cenderung bersifat reaktif terhadap permasalahan fisik yang sudah muncul ke permukaan dan audit sosial melalui reses masih menghadapi tantangan objektivitas partisipasi konstituen.

3. Akuntansi (*Accounting*)

DPRD Kabupaten Sidoarjo cukup berhasil dalam menjalankan fungsi akuntansi melalui penyajian "pencatatan sosial" yang mampu memotret dampak anggaran terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini tercermin dari kenaikan angka IPM menjadi 82,67 dan penurunan kemiskinan hingga 4,53% sebagai hasil *monitoring* terhadap sektor pelayanan dasar. Optimalisasi dampak kualitatif dari pencatatan ini masih menghadapi kendala transparansi data mikro dari pihak eksekutif, yang berimplikasi pada tingginya angka SiLPA sebesar Rp642,7 miliar akibat kapasitas fiskal yang tidak terserap secara maksimal.

4. Eksplanasi (*Explanation*)

Monitoring DPRD secara resmi dinyatakan berhasil dalam variabel eksplanasi karena mampu mengungkap akar penyebab terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Lembaga legislatif berhasil memetakan fenomena *bureaucratic anxiety* atau trauma administratif birokrasi pasca-kasus korupsi sebagai penyebab utama lambatnya penyerapan

anggaran. Sikap tegas mayoritas fraksi dalam memberikan rekomendasi kritis hingga penolakan pada LKPJ Bupati merupakan bentuk eksplanasi politik yang berhasil mendorong urgensi reformasi birokrasi serta perbaikan manajemen lelang di lingkungan pemerintah daerah.

Kesimpulan menyeluruh mengenai analisis monitoring oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dinyatakan berhasil. Keberhasilan ini dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh dimensi pemantauan dalam teori William N. Dunn (2003), di mana lembaga legislatif telah menunjukkan performa pengawasan yang disiplin, kritis, dan mampu mengungkap fakta empiris di lapangan. Pernyataan keberhasilan ini menegaskan bahwa DPRD Sidoarjo telah menuntaskan mandat dalam pemantauannya secara optimal, meskipun efektivitas hasil akhirnya masih menghadapi tantangan berupa hambatan manajemen waktu dan transparansi data di tingkat eksekutif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa poin saran strategis yang ditujukan untuk mengoptimalkan efektivitas fungsi *monitoring* dan pengawasan DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaksanaan APBD di masa mendatang, sebagai berikut:

1. Penguatan Transparansi Digital: DPRD perlu mendesak pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pelaporan rincian belanja secara *real-time* yang dapat diakses oleh komisi-komisi terkait, guna menghindari laporan "gelondongan" dan mempermudah fungsi *monitoring* teknis.

2. Reformasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa di awal tahun anggaran untuk menghindari penumpukan serapan di akhir tahun dan meminimalisir tingginya SiLPA.
3. Objektivitas Audit Sosial: DPRD sebaiknya memperluas partisipasi masyarakat dalam forum reses dengan melibatkan kelompok-kelompok kritis non-partisipan guna memperoleh data lapangan yang lebih objektif dan berimbang.
4. Penguatan Tindak Lanjut Rekomendasi: DPRD harus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi LKPJ secara periodik, agar catatan-catatan kritis yang diberikan tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi dasar sanksi atau insentif bagi OPD yang kinerjanya tidak mencapai target.